



IMPLIKASI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AMERIKA SERIKAT TERHADAP UMKM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF WTO

Inggrit Carolina Nafi¹, J.M. Atik Krustiyati²

^{1,2}Universitas Surabaya, Indonesia

Email: inggrit.nafi@gmail.com

Abstrak

Globalisasi telah mendorong perkembangan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti most-favoured nation (MFN), national treatment, dan non-diskriminasi yang bertujuan menciptakan perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UMKM dalam perdagangan internasional menjadikan sektor ini rentan terhadap dinamika kebijakan perdagangan global, salah satunya kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia pada tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak terhadap UMKM Indonesia, khususnya produsen kopi Teluk Gayo di Aceh, akibat meningkatnya biaya ekspor karena tarif impor yang semula sebesar 32% dan kemudian diturunkan menjadi 19%. Meskipun terjadi penurunan tarif, beban biaya ekspor tetap menimbulkan kerugian sehingga eksportir kopi Teluk Gayo memutuskan untuk membatalkan pengiriman ke pasar Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia dalam perspektif WTO serta meninjau peran pemerintah dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor Amerika Serikat berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang memengaruhi daya saing dan akses pasar UMKM Indonesia serta bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah melalui perlindungan hukum, dukungan kebijakan, dan penguatan diplomasi perdagangan guna menjaga keberlangsungan UMKM Indonesia dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci : WTO; perdagangan internasional; tarif impor; UMKM Indonesia; prinsip non-diskriminasi.

Abstract

Globalization has encouraged the development of international trade through a multilateral trading system regulated by the World Trade Organization (WTO). As a WTO member, Indonesia is bound by international trade principles such as most-favoured nation (MFN), national treatment, and non-discrimination, which aim to create fair and open international trade. On the other hand, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, both as providers of employment opportunities and as contributors to economic growth. The expansion of MSMEs into international trade has made this sector vulnerable to the dynamics of global trade policies, one of which is the United States import tariff policy imposed on Indonesian products in 2025. This policy



affected Indonesian MSMEs, particularly Teluk Gayo coffee producers in Aceh, due to increased export costs caused by import tariffs that were initially set at 32% and later reduced to 19%. Despite the tariff reduction, the export cost burden continued to cause significant losses, leading Teluk Gayo coffee exporters to cancel shipments to the United States market. This study aims to analyze the implications of the United States import tariff policy on Indonesian MSMEs from the perspective of the WTO and to examine the role of the Indonesian government in addressing international trade barriers. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the United States import tariff policy has the potential to become a trade barrier that affects the competitiveness and market access of Indonesian MSMEs and is inconsistent with the WTO principle of non-discrimination. Therefore, the government's active role is needed through legal protection, policy support, and the strengthening of trade diplomacy to maintain the sustainability of Indonesian MSMEs in international trade.

Keywords : *WTO; international trade; import tariffs; Indonesian MSMEs; non-discrimination principle.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perekonomian dunia, khususnya pada bidang perdagangan internasional. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi mendorong hubungan ekonomi antarnegara menjadi semakin terbuka dan saling bergantung. Perdagangan internasional tidak lagi dipandang sekadar aktivitas pertukaran barang dan jasa, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing suatu negara di pasar global. Dalam konteks tersebut, negara-negara di dunia berupaya membangun sistem perdagangan yang teratur dan mampu menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku perdagangan internasional.

Perkembangan perdagangan internasional kemudian melahirkan suatu sistem perdagangan multilateral yang diwujudkan melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. GATT menjadi landasan awal dalam mengatur hubungan perdagangan antarnegara dengan menekankan pengurangan hambatan perdagangan dan penerapan prinsip perdagangan yang adil. Seiring perkembangan ekonomi global, GATT mengalami transformasi menjadi World Trade Organization (WTO) melalui Marrakesh Agreement 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. WTO hadir sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan lebih kuat dalam mengatur perdagangan internasional serta menyelesaikan sengketa perdagangan antarnegara anggota.

Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada berbagai prinsip dasar perdagangan internasional, seperti prinsip most-favoured nation (MFN), national treatment, dan non-discrimination. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif antarnegara anggota. Menurut Cinta Aisyah Putri (2025), WTO dibentuk untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam perdagangan internasional melalui penerapan aturan yang mengikat seluruh negara anggota sehingga mampu menciptakan stabilitas perdagangan global. Keberadaan WTO menjadi penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperoleh akses pasar internasional yang lebih luas dan setara.



Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Keberadaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan bahwa UMKM perlu memperoleh perlindungan, pemberdayaan, dan kesempatan usaha guna meningkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan globalisasi mendorong UMKM Indonesia untuk memperluas pasar hingga ke perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan devisa negara dan penguatan daya saing produk lokal di pasar global. Akan tetapi, keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional juga menyebabkan sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan negara lain, terutama negara-negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Salah satu dinamika perdagangan internasional yang menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda proteksionisme ekonomi yang bertujuan melindungi industri domestik Amerika Serikat melalui peningkatan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif impor tersebut pada awalnya ditetapkan sebesar 32% terhadap beberapa produk Indonesia sebelum akhirnya diturunkan menjadi 19% setelah proses negosiasi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap keberlangsungan UMKM Indonesia yang bergantung pada kegiatan ekspor, salah satunya produsen kopi Teluk Gayo di Aceh. Peningkatan tarif impor menyebabkan biaya ekspor menjadi lebih tinggi sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Menurut Ida Ayu Putu Megawati dkk. (2025), kebijakan proteksionisme Amerika Serikat berpotensi menghambat arus perdagangan internasional serta meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara berkembang yang memiliki ketergantungan pada pasar ekspor global. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perdagangan suatu negara dapat memberikan implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi negara lain.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tarif impor Amerika Serikat berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Prinsip non-diskriminasi menghendaki agar setiap negara anggota WTO memberikan perlakuan yang sama terhadap negara anggota lainnya tanpa adanya perlakuan khusus yang merugikan pihak tertentu. Penerapan tarif impor dengan persentase yang berbeda terhadap negara berkembang dinilai dapat menciptakan ketidakadilan perdagangan dan menghambat akses pasar bagi negara-negara tertentu. Muhammad Farris Ghondur Siregar (2023) menjelaskan bahwa prinsip non-diskriminasi merupakan elemen fundamental dalam WTO guna mencegah praktik perdagangan yang bersifat diskriminatif antarnegara anggota.

Kondisi tersebut menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi yang penting dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional dan melindungi kepentingan UMKM nasional. Pemerintah perlu melakukan langkah strategis melalui diplomasi perdagangan, negosiasi bilateral, serta pemberian perlindungan hukum terhadap UMKM yang terdampak kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, pemerintah juga perlu



memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu, khususnya Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia dalam perspektif WTO serta meninjau peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perdagangan internasional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan terhadap UMKM Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan kebijakan tarif impor. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum (Soerjono Soekanto, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *World Trade Organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai prinsip *non-diskriminasi*, *most-favoured nation (MFN)*, dan *national treatment* dalam sistem perdagangan internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan implikasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia dalam perspektif WTO. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap UMKM Indonesia

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui perdagangan internasional, setiap negara dapat memperluas pasar, meningkatkan devisa negara, dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar global. Dalam praktiknya,



perdagangan internasional tidak hanya melibatkan hubungan ekonomi antarnegara, tetapi juga berkaitan dengan penerapan aturan hukum internasional yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil dan terbuka.

Sejak terbentuknya World Trade Organization (WTO), negara-negara anggota diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, seperti most-favoured nation (MFN), national treatment, dan non-discrimination. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah adanya perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat antarnegara anggota WTO. Menurut Cinta Aisyah Putri, WTO dibentuk untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui aturan yang mengikat secara hukum bagi seluruh negara anggota (Cinta Aisyah Putri, 2025).

Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional dengan ketentuan perdagangan internasional. Hal tersebut penting guna menjaga hubungan perdagangan dengan negara lain serta memastikan produk Indonesia memperoleh akses pasar yang adil di tingkat internasional. Dalam konteks ini, keberadaan UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

UMKM memiliki peranan strategis sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi masyarakat. Selain memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Perkembangan globalisasi mendorong UMKM Indonesia untuk memperluas pasar hingga ke perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor produk lokal ke berbagai negara.

Akan tetapi, keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional menyebabkan sektor ini sangat rentan terhadap dinamika kebijakan perdagangan global. Salah satu kebijakan yang memberikan dampak signifikan terhadap UMKM Indonesia adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme ekonomi yang bertujuan melindungi industri domestik Amerika Serikat dari persaingan produk impor.

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat pada awalnya menetapkan tarif sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia. Kebijakan tersebut menyebabkan meningkatnya biaya ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat sehingga mempengaruhi daya saing produk nasional. Menurut Ida Ayu Putu Megawati dkk., kebijakan proteksionisme Amerika Serikat berpotensi menghambat arus perdagangan bebas dan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara berkembang yang bergantung pada kegiatan ekspor (Ida Ayu Putu Megawati dkk., 2025).

Dampak dari kebijakan tarif impor tersebut dirasakan secara langsung oleh UMKM Indonesia, khususnya produsen kopi Teluk Gayo di Aceh. Kopi Teluk Gayo merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Akan tetapi, peningkatan tarif impor menyebabkan biaya distribusi dan ekspor menjadi lebih besar sehingga mengurangi keuntungan eksportir kopi.

Kondisi tersebut menyebabkan eksportir kopi Teluk Gayo mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar. Bahkan, beberapa eksportir memutuskan untuk membatalkan pengiriman kopi ke Amerika Serikat karena biaya ekspor yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Situasi ini menunjukkan



bahwa kebijakan perdagangan negara maju dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha UMKM di negara berkembang.

Secara ekonomi, kebijakan tarif impor dapat menghambat akses pasar internasional bagi UMKM Indonesia. Tingginya tarif impor menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar tujuan ekspor sehingga daya saing produk menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas produksi, pendapatan pelaku usaha, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM.

Selain berdampak terhadap aspek ekonomi, kebijakan tarif impor Amerika Serikat juga menimbulkan implikasi hukum dalam perdagangan internasional. Penerapan tarif impor dengan persentase yang berbeda terhadap negara-negara tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Prinsip non-diskriminasi menghendaki agar seluruh negara anggota WTO memperoleh perlakuan yang sama dalam perdagangan internasional.

Menurut Muhammad Farris Ghondur Siregar, prinsip non-diskriminasi dalam WTO merupakan prinsip fundamental yang bertujuan mencegah perlakuan diskriminatif antarnegara anggota dalam hubungan perdagangan internasional (Muhammad Farris Ghondur Siregar, 2023). Oleh karena itu, penerapan tarif impor yang berbeda-beda terhadap negara berkembang dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam sistem perdagangan internasional.

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat tidak hanya diterapkan kepada Indonesia, tetapi juga kepada beberapa negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja dengan persentase tarif yang berbeda. Perbedaan penerapan tarif tersebut menimbulkan ketidakpastian perdagangan internasional serta meningkatkan kerentanan ekonomi negara-negara berkembang terhadap tekanan ekonomi global.

Dalam perspektif WTO, kebijakan proteksionisme yang dilakukan secara berlebihan dapat memicu terjadinya sengketa perdagangan internasional. Negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lain dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan negara anggota terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pasar Amerika Serikat, khususnya dalam kegiatan ekspor komoditas dan produk UMKM. Oleh karena itu, kebijakan tarif impor Amerika Serikat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap stabilitas perdagangan nasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa UMKM Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing di pasar global.

Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap satu pasar ekspor dapat meningkatkan risiko ekonomi nasional apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, diperlukan strategi diversifikasi pasar ekspor agar produk UMKM Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar Amerika Serikat, tetapi juga mampu menembus pasar negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan negara-negara di kawasan Eropa.

Dengan demikian, kebijakan tarif impor Amerika Serikat telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun hukum perdagangan internasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha nasional.



B. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat

Dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan UMKM. Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga hubungan diplomatik dengan negara mitra dagang, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional yang terdampak kebijakan perdagangan internasional.

Peran pemerintah dalam perdagangan internasional pada dasarnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi perdagangan guna menurunkan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui proses negosiasi bilateral dengan pemerintah Amerika Serikat. Negosiasi tersebut bertujuan mencari titik temu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sekaligus mengurangi dampak negatif kebijakan tarif impor terhadap perekonomian Indonesia. Proses negosiasi tersebut menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan dalam menyelesaikan hambatan perdagangan internasional.

Menurut Kevin Anandita Rukmana dkk., keberhasilan negosiasi perdagangan internasional dapat dijelaskan melalui teori bargaining dalam ekonomi internasional, di mana setiap negara berupaya memperoleh keuntungan melalui proses tawar-menawar yang saling menguntungkan (Kevin Anandita Rukmana dkk., 2025). Dalam hal ini, Indonesia berusaha memanfaatkan posisi strategisnya sebagai pasar potensial bagi produk Amerika Serikat.

Melalui proses negosiasi yang cukup panjang, tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia akhirnya diturunkan dari 32% menjadi 19%. Penurunan tarif tersebut menunjukkan adanya kompromi antara kedua negara guna menjaga hubungan perdagangan bilateral agar tetap stabil dan berkelanjutan.

Meskipun terjadi penurunan tarif impor, pada kenyataannya kebijakan tersebut masih memberikan beban yang cukup berat bagi UMKM Indonesia. Biaya ekspor yang tinggi tetap mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah lanjutan guna memperkuat ketahanan UMKM nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

Selain melalui diplomasi perdagangan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kebijakan terhadap UMKM yang terdampak kebijakan tarif impor. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan pembiayaan, subsidi ekspor, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar internasional bagi UMKM Indonesia.

Menurut Andri Sutrisno, kebijakan perdagangan internasional harus disertai dengan langkah perlindungan hukum dan kebijakan ekonomi nasional agar mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan perdagangan global (Andri Sutrisno, 2025). Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek diplomasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.



Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi penting agar produk UMKM Indonesia memiliki akses pasar yang lebih luas dan stabil di tingkat internasional.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM Indonesia melalui penguatan inovasi, teknologi, dan standarisasi produk. Dalam perdagangan internasional, kualitas produk menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan suatu negara dalam bersaing di pasar global.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, pemerintah Indonesia juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum apabila kebijakan perdagangan negara lain dianggap merugikan kepentingan nasional dan bertentangan dengan aturan WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat menjadi instrumen hukum bagi negara anggota untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan internasional.

Keberadaan WTO pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi negara anggota agar tidak terjadi tindakan perdagangan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh negara lain. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memanfaatkan mekanisme WTO secara optimal dalam menghadapi berbagai hambatan perdagangan internasional yang merugikan kepentingan nasional.

Selain perlindungan hukum, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi UMKM guna memahami secara langsung kendala yang dihadapi dalam kegiatan ekspor. Koordinasi tersebut penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha nasional.

Pada akhirnya, peran pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan UMKM Indonesia di tengah persaingan perdagangan internasional. Melalui diplomasi perdagangan, perlindungan hukum, diversifikasi pasar ekspor, dan penguatan daya saing UMKM, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia pada tahun 2025 memberikan implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM Indonesia, khususnya UMKM yang bergerak di bidang ekspor seperti produsen kopi Teluk Gayo di Aceh. Penerapan tarif impor yang tinggi menyebabkan meningkatnya biaya ekspor sehingga menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha UMKM. Dalam perspektif WTO, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi karena adanya perbedaan perlakuan tarif terhadap negara-negara tertentu.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat melalui diplomasi perdagangan, negosiasi bilateral, serta pemberian perlindungan dan dukungan kebijakan terhadap UMKM nasional. Penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19% menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan guna memperkuat daya saing UMKM Indonesia dalam perdagangan internasional.



B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat perlindungan dan dukungan terhadap UMKM melalui bantuan pembiayaan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar internasional agar UMKM mampu bersaing di tengah dinamika perdagangan global.
2. Selain itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat serta memanfaatkan mekanisme WTO secara optimal dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

B. Buku

Hata. *Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syahputra, Iman Prihandono. *Hukum Perdagangan Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aisyah Putri, Cinta. "Analisis Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Memastikan Keadilan Sistem Perdagangan Internasional Modern." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2025.

Fatayati Syarif, Lina. "Dampak Kebijakan Tarif Impor Baru Amerika Serikat terhadap Industri Karet Alam Indonesia." *De Plantation: Radar Opini dan Analisis Perkebunan*, 2025.

Ghondur Siregar, Muhammad Farris. "Kasus Diskriminasi Rokok Kretek Indonesia oleh Amerika Serikat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2023.

Kasih, Desak Putu Dewi, dkk. "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021.



- Megawati, Ida Ayu Putu, dkk. "Dampak Kebijakan Ekonomi Trump 2.0 terhadap Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis*, 2025.
- Prahaski, Nabila, dkk. "Kebijakan Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang." *Jurnal Minfo Polgan*, 2023.
- Rukmana, Kevin Anandita, dkk. "Peran Kebijakan Tarif dalam Menyeimbangkan Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2025.
- Sianturi, Mouna Suez. "Penerapan CBAM dengan Prinsip Non-Diskriminasi WTO dalam Hukum Perdagangan Internasional."
- Sutrisno, Andri. "Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah dalam Pelayanan Publik." *Iblam Law Review*, 2025.
- Yulianto, Agus. "Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perdagangan Internasional." *Jurnal Rechtsvinding*, 2022.
- Zamroni, Muhammad. "Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.